



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2022	Hal.: /																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Pembahasan Empat Raperda Berlanjut



RAPAT PARIPURNA: Suasana Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota Pontianak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Empat Raperda, yang disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan.

Pembahasan Empat Raperda Berlanjut

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan Jawaban Wali Kota Pontianak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (2/12).

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Sambungan dari halaman 1

Keempat Raperda itu adalah Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Perubahan Kelima atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. "Jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi diupayakan dapat merespon

pertanyaan, saran dan pendapat fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna kemarin," ujarnya di hadapan peserta Rapat Paripurna kesepuluh masa persidangan I tahun 2022-2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (2/12).

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Amanat Keadilan Bangsa terkait penjelasan dan penjabaran tentang penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang jumlahnya meningkat setiap tahun, Bahasan menjelaskan bahwa penyertaan modal tersebut tidak membebani APBD

Kota Pontianak secara langsung.

Mekanisme pembiayaan untuk program penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini diperoleh melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pembiayaannya dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui APBD. Selanjutnya, setelah proses administrasinya selesai maka pemerintah pusat akan menyertakan kembali dana yang digunakan melalui APBN ke APBD yang kemudian disertakan dalam penyertaan modal kepada PDAM," jelasnya.

Kemudian, pihaknya juga akan segera melakukan pembahasan lebih lanjut serta menetapkan keempat raperda yang diusulkan tersebut sebagaimana pendapat dan saran yang disampaikan oleh Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai PPP, Fraksi Partai Hati Nurani Golkar Bintang Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Keadilan Bangsa.

"Kami sangat berterima kasih kepada seluruh Fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi positif terhadap empat raperda yang kami usulkan," tutupnya. (iza/r)